BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki peran strategis bagi ekonomi suatu negara. Naik turunnya perekonomian suatu negara sedikit banyak dipengaruhi oleh sektor perbankan. Pada sistem ekonomi modern, perbankan dapat diibaratkan sebagai jantung yang memompa aliran darah berupa modal ke seluruh urat nadi perekonomian, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Sehingga, dapat dibayangkan betapa permasalahan yang muncul di sektor perbankan dapat berpengaruh luas ke berbagai sektor ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan mempengaruhi ekonomi secara nasional (Suta dan Musa 2003). Selain itu sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses *recovery* perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena selain menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank juga berperan dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran nasional.

Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Tujuan pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.

Tujuan kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila kedua peranan ini dapat berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya perputaran arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Karena uang tidak

beredar maka masyarakat tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun dan dijalankan karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Lembaga keuangan bank mempunyai peranan strategi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (financial intermediaries) dari penabung (lender) kepada peminjam (borrowers).

Bagi sebuah bank yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang memerlukan dana dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Mishkin (2001), secara sederhana menjelaskan bank sebagai lembaga keuangan yang menerima deposito dan memberikan pinjaman (financial intermediaries). Dengan menerima deposito dan memberikan pinjaman, maka dapat menimbulkan interaksi antara orang yang membutuhkan pinjaman untuk membiayai kebutuhan hidupnya, dengan orang yang memiliki kelebihan dana dan berusaha menjaga keuangannya dalam bentuk tabungan dan deposito lainnya di bank. Financial intermediation merupakan suatu aktivitas penting dalam perekonomian, karena dapat menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif dalam mengelola dana. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis.

Sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut bukan dana milik bank sendiri, sehingga perbankan berusaha dan berlombalomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan

dananya pada bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah, bunga yang tinggi, dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam bank untuk jangka waktu yang lama. Dana masyarakat yang disimpan pada bank, pada umumnya dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan lain-lain.

Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu cukup lama merupakan sumber utama bagi bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit. Karena itu suatu bank yang tidak memiliki sumber dana dari masyarakat yang memadai akan sangat mengganggu usaha dan kegiatan bank dan bank juga tidak mampu memperluas ekspansinya.

Peningkatan perekonomian suatu negara dan tingkat kesejahteraan penduduk secara umum dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan penduduk dan mengurangi pengangguran. Untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi, mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, mengurangi pengangguran, maka pemerintah perlu melakukan intervensi pengaturan kebijakan fiskal dan moneter.

Salah satu kebijakan moneter adalah perubahan suku bunga yang bertujuan untuk meredam laju inflasi dan memperkuat nilai tukar mata uang suatu negara. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat sehingga standar hidup masyarakat juga turun. Inflasi yang tidak stabil juga akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Selain itu, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat suku bunga riil

menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan kepada nilai tukar rupiah (Tanudjaja 2006).

Jika inflasi di Indonesia sedang tinggi maka pemerintah (dalam hal ini BI) akan berusaha mengendalikan laju inflasi tersebut dengan cara menaikan suku bunga BI rate. Dengan naiknya suku bunga BI rate maka akan mengakibatkan naiknya suku bunga dana pihak ketiga perbankan nasional. Dengan naiknya suku bunga dana pihak ketiga maka biaya yang dikeluarkan perbankan untuk menghimpun dana pihak ketiga juga meningkat sehingga biaya dana (cost of fund) perbankan akan meningkat. Jika ini terjadi maka suku bunga pinjaman perbankan juga akan meningkat sehingga kemungkinan terjadinya pinjaman bermasalah (non performing loan) semakin besar.

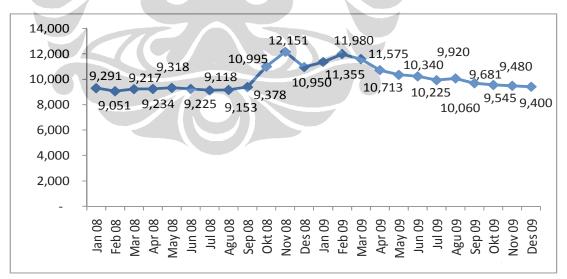
Perbankan merupakan industri keuangan yang terkait dengan perubahan suku bunga dan nilai tukar. Depresiasi nilai tukar mata uang juga berpotensi untuk meningkatkan masalah bagi pinjaman yang diberikan dalam valuta asing kepada perusahaan yang pendapatannya bukan dalam valuta asing. Jika depresiasi nilai tukar mata uang terjadi secara signifikan maka pinjaman dalam valuta asing dapat menjadi bermasalah dan menimbulkan kerugian bagi bank.

Manajemen bank yang baik harus dapat mengantisipasi setiap perubahan faktor ekonomi yang terjadi baik itu perubahan inflasi, suku bunga dan perubahan nilai tukar rupiah sehingga bank dapat memaksimalkan profit yang didapat dan mengurangi kerugian yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Masing-masing bank memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda dalam portofolio pendanaan, portofolio pinjaman, dan kemampuan melakukan transaksi valuta asing, sehingga pengaruh perubahan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah akan berbeda antara satu bank dengan bank lainnya.

Tantangan perbankan nasional saat ini dan masa depan makin besar dan kompleks. Industri perbankan nasional telah mengalami perkembangan pasang surut sejak beberapa dekade terakhir. Salah satu perkembangan yang menyita banyak perhatian adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Krisis tersebut menimbulkan dampak negatif bagi industri perbankan nasional, antara lain ditandai dengan terkikisnya permodalan bank, meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL), dan penutupan sejumlah bank.

Begitu pula apa yang terjadi pada tahun 2008 ketika krisis keuangan global melanda. Krisis keuangan global 2008 dimulai dari Amerika dan meluas ke hampir seluruh belahan dunia. Bursa saham berjatuhan. Perusahaan-perusahaan keuangan multinasional bangkrut. Banyak perusahaan di AS melakukan pengurangan pekerja. Akibat krisis keuangan di AS, para investor portfolio di bursa saham menarik dananya. Akibatnya, bursa saham rontok semua dan kini nilai tukar mata uang asia ikut rontok. Nilai tukar rupiah terhadap dollar sempat mencapai level Rp12.000 per USD1 seperti yang terlihat dalam grafik 1.1.

Grafik 1.1 Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS 2008 – 2009



Sumber: Bank Indonesia (telah diolah kembali)

Akibat yang dirasakan dari krisis global adalah rontoknya bursa saham karena lebih dari 60% saham dimiliki oleh orang asing (Widarto 2008, paragraf 6). Rupiah melemah karena adanya penarikan dana dari pemilik modal yang bangkrut. Ekspor menurun karena permintaan dari negara tujuan ekspor juga turun. Keuntungan Indonesia adalah karena pasar modal dan pasar uang di Indonesia masih kuno. Penduduk Indonesia yang bermain di bursa saham masih kurang dari 30% dan ekonomi nasional masih didominasi oleh transaksi riil, bukan transaksi derivatif. Hal ini berbeda dengan Jepang dan Singapura yang langsung ikut rontok sebagai imbas krisis ekonomi 2008.

Selain dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, dampak lain dari krisis global adalah tekanan terhadap inflasi. Tekanan inflasi makin tinggi akibat harga komoditi global yang tinggi. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga komoditi dunia terutama minyak dan pangan. Lonjakan harga tersebut berdampak pada kenaikan harga barang seiring dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

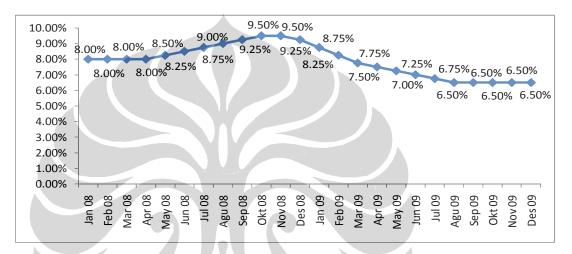
14.00% 12.14% 11.90% 11.68% 12.00% 11.03% 11.06% 11.85% 11.77% 10.00% 10.38% 8.60% 9.17% 8.00% 7.31% 8.17% 7.92% 7.40% 6.00% 6.04% 4.00% 2.75% 2.57% 2.78% 2.00% 2.41% 0.00% Jan 09 Mar 09 Jun 08
Jul 08
Agu 08
Sep 08
Okt 08
Nov 08
Des 08

Grafik 1.2 Pergerakan Inflasi Indonesia 2008 – 2009

Sumber: Bank Indonesia (telah diolah kembali)

Untuk mengantisipasi berlanjutnya tekanan inflasi, BI menaikkan BI *rate* secara bertahap dari 8 persen menjadi 9,5 persen pada Oktober 2008. Dengan kebijakan moneter tersebut ekspektasi inflasi masyarakat tidak terakselerasi lebih lanjut, seperti yang terlihat pada grafik 1.3.

Grafik 1.3 BI Rate 2008 – 2009



Sumber: Bank Indonesia (telah diolah kembali)

Sebagai akibat dari krisis keuangan dunia, dipredikasi akan memicu meningkatnya kredit bermasalah (*non-performing loan*/"NPL") di industri perbankan nasional. Semua bank akan terkena kredit bermasalah tak terkecuali bank swasta nasional dan asing (Wibowo 2008, paragraf 1).

Makin membengkaknya kredit bermasalah disebabkan oleh terganggunya arus kas penerimaan dari para debitur. Kondisi tersebut membuat debitor akan sulit untuk melunasi hutang-hutangnya. Selain itu, para debitor tersebut juga menghadapi kesulitan likuiditas, karena importir yang membeli barang, membayarnya dari semula satu bulan menjadi dua bulan. Sehingga, mereka meminta penangguhan pembayaran, oleh karena para debitur meminta penangguhan pembayaran.

Hadad (2009, paragraf 1 – 3) menjelaskan bahwa tingkat kredit bermasalah (NPL) diperkirakan akan mengalami kenaikan pada tahun 2009. Untuk risiko likuiditas di 2009 akan stabil. Tapi risiko kredit akan cenderung meningkat. Kenaikan NPL tersebut diperkirakan sebesar 5 persen, angka tersebut lebih tinggi dari NPL gross perbankan 2008 yang mencapai 4 persen dan NPL net 1,5 persen. Kenaikan NPL tersebut terjadi karena risiko kredit yang makin tinggi ditengah krisis keuangan global.

Sedangkan Adam (2009, paragraf 1 & 2) mengatakan bahwa kualitas kredit perbankan cenderung mengalami pembusukan. Indikasinya terlihat cukup jelas dari peningkatan kredit macet (NPL). Sampai dengan pertengahan Maret 2009, nominal NPL perbankan sudah mencapai Rp 54 triliun, meningkat sebesar Rp 12 triliun dari semula Rp 42 triliun pada akhir Desember 2008.

Peningkatan NPL di tahun 2009 merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan. *Pertama*, imbas negatif krisis keuangan global tidak hanya menurunkan *aggregate demand*, tetapi juga memaksa perusahaan masuk ke iklim persaingan yang semakin ketat. Keadaan ini membuat perusahaan mengalami kesulitan dalam mempertahankan pasar dan memperburuk prospek usaha. Konsekuensinya, pendapatan perusahaan menurun dan neraca keuangannya mengalami pembusukan. Hal ini kemudian membuat perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman ke perbankan.

Kedua, kebijakan perbankan mempertahankan suku bunga kredit tinggi di tengahtengah kondisi perekonomian yang tidak stabil juga berkontribusi terhadap naiknya NPL. Tingginya suku bunga kredit pada saat pendapatan dan neraca keuangan perusahaan mengalami penurunan membuat beban angsuran pinjaman perusahaan ke perbankan, secara relatif, mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Suku Bunga Pinjaman yang Berlaku 2008 – 2009 (persentase)

Jenis Pinjaman	2008				2009			
	Mar	Jun	Sep	Dec	Mar	Jun	Sep	Dec
					14.71			
2 Pinjaman Investasi Yang Diberikan					13.97			
3 Pinjaman Konsumsi Yang Diberikan	18.77	18.64	18.70	19.11	19.15	19.36	19.40	19.26

Sumber : Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (telah diolah kembali)

Ketiga, ketidak-hati-hatian perbankan dalam menyalurkan kreditnya kemungkinan juga mendorong naiknya NPL. Ketika perbankan tetap mempertahankan suku bunga kredit tinggi, secara tidak langsung perbankan sebenarnya bermain dengan kemungkinan meningkatnya risiko kredit bermasalah. Pada saat suku bunga kredit tetap tinggi, maka hanya perusahaan *risk taker* (pengambil risiko) saja yang akan mengajukan permintaan kredit ke perbankan.

Perkembangan bank saat ini cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dengan sasaran mencapai volume kredit yang tinggi untuk mendapatkan profit semata (Ibrahim 2004, hal 2). Sasaran yang dicapai adalah meraup pangsa pasar sebesar mungkin dengan meniadakan persaingan usaha yang sehat. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa di luar bunga kredit yang disebut fee base income. Berbeda di negara-negara yang sudah maju laporan keuangan menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga, dibanding dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi

bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Dengan demikian keberhasilan unit kerja pengelolaan kredit, seperti seksi kredit, bagian kredit, atau divisi kredit dalam menjaga kualitas kredit berupa pembayaran bunga dan pokok yang lancar, merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu bank. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan, maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi kredit risiko bermasalah. Akan tetapi jika bank hanya ingin mencapai volume kredit yang tinggi untuk mendapatkan profit semata dan mengabaikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bukan untung yang akan diperoleh, melainkan kerugian yang disebabkan oleh kredit yang diberikan menjadi macet atau bermasalah.

Dalam kaitan ini seharusnya perbankan meningkatkan manajemen kontrol yang lebih ketat dalam menjalankan proses seleksi dan verifikasi calon debitur untuk menilai agunan dan prospek usaha, pencairan kredit, monitoring, dan pengumpulan pengembalian kredit, sehingga kredit yang diberikan tidak menjadi macet atau bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Peneliti

Industri perbankan di suatu negara tentu sangat berkaitan dengan perekonomian di negara tersebut. Jika perekonomian suatu negara sedang berkembang, maka industri perbankan juga dapat tumbuh berkembang. Namun sebaliknya jika perekonomian sedang mengalami krisis, maka hal ini dapat pula berdampak kepada industri perbankan. Sebagai contoh, krisis yang terjadi di tahun 1997 membawa dampak negatif bagi industri perbankan nasional, antara lain ditandai dengan terkikisnya permodalan bank, meningkatnya *Non Performing Loan (NPL)*, dan penutupan sejumlah bank.

Bagaimana krisis ekonomi dapat berpengaruh terhadap industri perbankan? Seperti di ketahui bersama salah satu kegiatan utama perbankan adalah menyalurkan kredit. Bank tentu berharap kredit-kredit yang disalurkan tersebut dapat dibayar dengan lancar. Namun kemampuan debitur dalam membayar sangat dipengaruhi diantaranya oleh kondisi perekonomian. Jika perekonomian sedang mengalami krisis maka dapat berakibat terganggunya arus kas penerimaan dari para debitur. Kondisi itu membuat debitur akan sulit untuk melunasi utang-utangnya. Jika banyak debitur yang meminta penangguhan pembayaran maka kondisi ini akan membuat *Non Performing Loan* (NPL) Bank-bank BPD akan meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pertanyaan peneliti adalah:

- 1. Apakah perubahan Inflasi berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Bank-bank BPD?
- 2. Apakah perubahan Suku Bunga SBI berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Bank-bank BPD?
- 3. Apakah perubahan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL) Bank-bank BPD?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh tingkat inflasi terhadap Non Performing Loan Bank-bank BPD sehingga dapat mengantisipasi pelemahan NPL Bank-bank BPD.
- 2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh tingkat suku bunga terhadap *Non Performing Loan* Bank-bank BPD sehingga dapat mengantisipasi pelemahan NPL Bank-bank BPD.

3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap *Non Performing Loan* Bank-bank BPD sehingga dapat mengantisipasi pelemahan NPL Bank-bank BPD.

1.4 Pembatasan Masalah

Penelitian karya akhir ini akan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah, atau biasa dikenal dengan nama NPL (*Non Performing Loan*) perbankan daerah (BPD). Analisis hubungan dan pengaruh dilakukan dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan pendekatan efek random. Analisis regresi data panel (*pool regression*) dilakukan untuk melihat keeratan hubungan antara satu atau beberapa variable independen dengan satu variabel dependen.

- 1. Obyek penelitian adalah NPL (Non Performing Loan) bank-bank BPD.
- 2. Data yang akan digunakan adalah data 3 bulanan. Untuk data NPL menggunakan data periode Juni 2003 Desember 2009.
- 3. Variabel faktor-faktor yang berpengaruh yang akan diuji pengaruhnya terhadap NPL (*Non Performing Loan*) meliputi : tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika. Untuk data tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar Amerika menggunakan data periode Maret 2003 September 2009.
- 4. Perbedaan periode antara angka NPL BPD dengan angka tingkat inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar (kurs) rupiah, terjadi karena perubahan variabel makro memiliki pengaruh terhadap perubahan angka NPL dengan perbedaan waktu (*time lag*) selama satu kuartal atau tiga bulan (Tanudjaja 2006, hal 52).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengaruh perubahan inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah terhadap *Non Performing Loan* (NPL) bank-bank BPD.

2. Manfaat bagi Bank-bank BPD

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi bank pembangunan daerah dalam menjaga *Non Performing Loan* (NPL) terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan inflasi, suku bunga SBI, dan nilai tukar rupiah.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel (*pool regression*), dan data-data yang diperoleh berasal dari Bank Indonesia, yang terjadi selama 7 tahun terakhir yaitu dari bulan Maret 2003 – Desember 2009.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan karya akhir ini dibagi dalam beberapa kelompok pembahasan. Dalam setiap pokok pembahasan tersebut terdapat sub-sub pokok pembahasan yang menjelaskan setiap detail topik yang dibahas serta memaparkan pembahasan sehingga menjadi alur yang jelas dan tetap dalam suatu kesatuan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat hal-hal yang menyangkut latar belakang masalah, rumusan masalah dan pertanyaan penelti, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat telaah literatur, referensi, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan topik penelitian serta kerangka konseptual yang berisi kesimpulan dari telaah literatur yang dipergunakan untuk menyusun asumsi topik penelitian ini.

BAB III: DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas data penelitian dan model analisis yang digunakan. Didukung data yang terdiri dari data-data: perubahan inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan *Non Performing Loan* (NPL).

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan merupakan bab yang menjelaskan bagaimana pengolahan atau analisa data dilakukan serta pembahasan atas hasil dari proses tersebut berupa penjelasan teoritik baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini memuat ikhtisar dari Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap *Non Performing Loan* Bank-Bank BPD serta kesimpulan dan saran mengenai hasil analisa data dan pembahasan dalam penelitian ini.